

# STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA AKEBAY DI PULAU MAITARA SEBAGAI DESTINASI UNGGULAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA

Khansa Syahrazade Andien

NPP. 32.1022

Asdraf Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: [32.1022@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1022@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Drs. Soenarko, M.Si, Helwani, S.Ag, M.Pdi

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The development of Akebay tourism as a leading destination has not yet met the target number of tourists as set in the RPJMD of Tidore Islands City for the years 2021-2026. **Objective:** To analyze the development strategy of Akebay tourism on Maitara Island by the Culture and Tourism Office of Tidore Islands City in its development process. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observations, and documentation. **Result:** The research found that the Department of Culture and Tourism has yet to optimally implement its duties in developing Akebay Tourism. An integrated strategy involving local government, the community, and tourism stakeholders is required. **Conclusion:** Strengthening the institutional roles, improving infrastructure, enhancing human resource capacity, and implementing effective promotional strategies are essential to developing Akebay Tourism into a sustainable and leading destination in Tidore Islands City.

**Keywords:** Development, Akebay Tourism, Tidore City

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pengembangan Wisata Akebay sebagai destinasi unggulan masih belum memenuhi jumlah wisatawan yang ditargetkan sesuai dengan RPJMD Kota Tidore Kepulauan tahun 2021-2026. **Tujuan:** Menganalisis strategi pengembangan Wisata Akebay di Pulau Maitara oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam proses pengembangannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore

Kepulauan belum maksimal dalam mendukung pengembangan Wisata Akebay. Diperlukan strategi pengelolaan terpadu yang melibatkan berbagai pihak untuk memaksimalkan potensi wisata tersebut.

**Kesimpulan:** Strategi pengembangan Wisata Akebay harus mencakup penguatan tugas dan fungsi dinas terkait, peningkatan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, dan promosi yang efektif agar dapat berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengembangan, Wisata Akebay, Kota Tidore

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang dimiliki oleh hampir setiap negara, termasuk Indonesia, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan masyarakat lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, hingga membuka peluang usaha baru yang secara keseluruhan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata yang terencana dan tepat sasaran sangat dibutuhkan guna memastikan potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. (Suning & Silvia Hawanayu Rahmadhany, 2022) menekankan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam memajukan sosial ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan. Jika dikelola secara profesional, sektor ini mampu memberikan efek berganda (multiplier effect), seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan apresiasi terhadap budaya lokal, hingga memperkuat identitas nasional melalui pariwisata berbasis budaya.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai yang mencapai lebih dari 99.000 km, menjadikannya sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Kekayaan ini tentu membuka peluang besar dalam pengembangan pariwisata bahari. Namun, potensi wisata Indonesia tidak hanya terbatas pada lautan. Keanekaragaman daratan Indonesia yang kaya akan budaya, adat istiadat, sejarah, serta keindahan alam tropis juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Maka dari itu, pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan perhatian terhadap kelestarian lingkungan, regulasi yang berlaku, serta sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan (Insani, 2021).

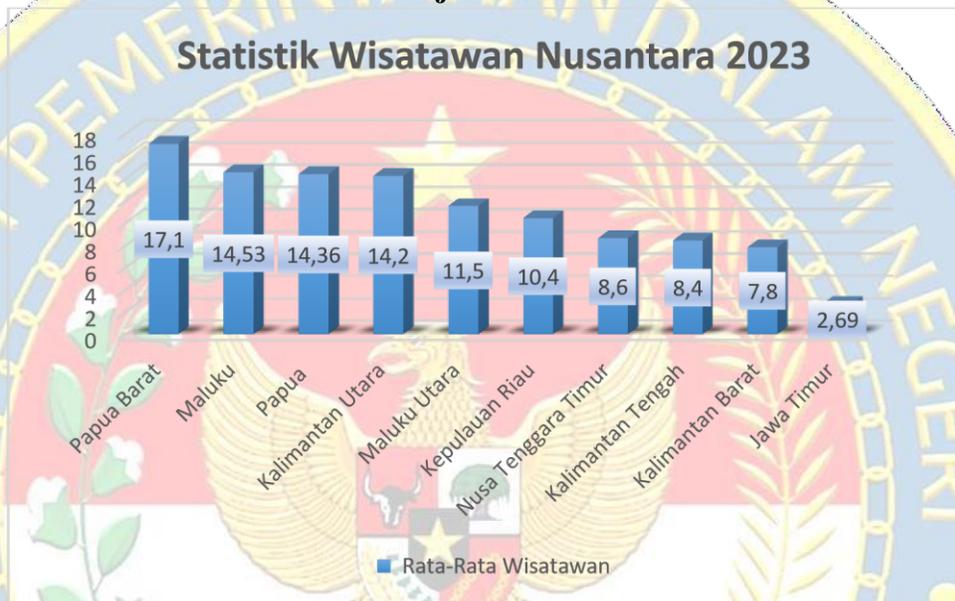
Pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting karena merekalah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dan objek wisata itu sendiri. Keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat juga sangat diperlukan. Stakeholder dalam sektor pariwisata meliputi industri pariwisata, konsumen, investor, aktivis lingkungan, pelestari budaya, masyarakat lokal, hingga pelaku ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah harus mampu menjembatani dan mengelola beragam kepentingan yang ada di antara para pemangku kepentingan tersebut agar arah pembangunan pariwisata tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan (Jayanti, 2018).

Dalam konteks hukum nasional, dasar pengembangan kepariwisataan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang ini menjelaskan bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling berhubungan dalam menciptakan dan menyediakan jasa guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Tercantum pula pada pasal 1 ayat (3) bahwa “pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Koordinasi antar unsur tersebut sangat diperlukan guna mengembangkan pariwisata daerah secara terpadu (Phasya, 2022).

Maluku Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia bagian timur memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, baik dari aspek alam, budaya, maupun sejarah. Provinsi ini terdiri dari dua kota dan tujuh kabupaten dengan total lebih dari seribu pulau, yang sebagian besar masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan pariwisata. Untuk mengatur pengembangan sektor ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah. Peraturan ini dibuat untuk menyelaraskan program pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Palupi & Fitri, 2019).

**Gambar 1.1 Grafik Perjalanan Wisatawan Nusantara**



Sumber : *Statistik Wisatawan Nusantara, 2023*

Statistik menunjukkan bahwa Maluku Utara menjadi salah satu provinsi dengan rata-rata lama kunjungan wisatawan nusantara tertinggi pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya minat yang cukup tinggi dari wisatawan terhadap destinasi-destinasi wisata di provinsi ini, meskipun letaknya jauh dari pusat-pusat ekonomi di Pulau Jawa. Tingginya lama kunjungan ini disebabkan oleh faktor geografis yang membuat perjalanan menuju Maluku Utara membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan wilayah lainnya (Napu et al., 2023).

Salah satu daerah di Maluku Utara yang tengah giat mengembangkan sektor pariwisatanya adalah Kota Tidore Kepulauan. Sebagai bagian dari proyek pembangunan nasional, Kota Tidore didorong untuk meningkatkan peran sektor pariwisata dalam mendukung perekonomian lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, dijelaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata harus mencakup empat misi utama, yakni: meningkatkan daya saing sektor pariwisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan hidup, serta mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkeadilan (Phuthong et al., 2023).

Misi tersebut memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, pelaku ekonomi lokal, hingga masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan objek wisata

secara profesional dan berkelanjutan. Pengembangan tersebut dilakukan untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian lokal, membuka lapangan kerja, dan menciptakan peluang usaha baru di sekitar kawasan wisata (Fernando, 2020).

**Tabel 1.1 Data Target Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Kota Tidore Kepulauan tahun 2021-2026**

No	Target Per Tahun	Wisatawan	
		Nusantara	Mancanegara
1	2021	28.350	50
2	2022	28.400	100
3	2023	28.500	150
4	2024	29.000	180
5	2025	29.100	230
6	2026	29.400	300

Sumber: *RPJMD Kota Tidore Kepulauan, 2021-2026*

Data dari RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2021–2026 menunjukkan adanya target peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Target untuk tahun 2023 adalah 28.500 wisatawan nusantara dan 150 wisatawan mancanegara. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan dan promosi pariwisata di Kota Tidore Kepulauan masih memiliki berbagai tantangan yang perlu diselesaikan agar potensi yang dimiliki bisa dimaksimalkan (Kagungan et al., 2021).

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata yang diterapkan di Kota Tidore Kepulauan. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk melihat sejauh mana target pembangunan pariwisata telah tercapai, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan potensi yang belum tergarap secara maksimal. Dalam proses evaluasi ini, akan diperhatikan aspek regulasi, peran serta masyarakat, dukungan infrastruktur, efektivitas promosi, serta daya tarik wisata itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan pembangunan sektor pariwisata di Kota Tidore Kepulauan dapat diarahkan secara lebih terstruktur, berdaya saing tinggi, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Pan et al., 2021).

Dengan pemaparan latar belakang ini, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Kota Tidore Kepulauan, sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara, menyimpan potensi besar yang jika dikelola dengan baik akan membawa dampak positif tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi, peningkatan kualitas layanan, serta pelestarian lingkungan hidup merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai pengembangan pariwisata sebagai instrumen pembangunan daerah telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi. Umumnya, kajian-kajian tersebut menyoroti aspek potensi wisata, strategi promosi, serta dampak ekonomi dari sektor pariwisata terhadap daerah tertentu. Namun, sebagian besar penelitian cenderung bersifat umum dan belum secara spesifik mengulas keterkaitan antara implementasi kebijakan pembangunan pariwisata daerah dengan pencapaian target kunjungan wisatawan secara terukur, terutama dalam konteks daerah-daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur, seperti Kota Tidore Kepulauan.

Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi wisata sangat besar, namun capaian jumlah kunjungan wisatawan belum sepenuhnya merefleksikan potensi tersebut. Data RPJMD menunjukkan adanya target kunjungan wisatawan yang cukup ambisius, namun realisasi dari target tersebut masih belum terpenuhi. Meskipun pemerintah daerah telah menerbitkan regulasi dan menetapkan arah pengembangan kepariwisataan, belum banyak kajian yang secara mendalam mengevaluasi sejauh mana strategi tersebut telah berjalan efektif, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pencapaian target.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga jarang mengangkat pentingnya integrasi antar pemangku kepentingan secara konkret di lapangan, baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat lokal, dalam mendukung terciptanya pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, belum ditemukan kajian komprehensif yang menganalisis secara khusus peran kolaboratif antara aktor-aktor tersebut dalam pengembangan wisata berbasis potensi lokal di Kota Tidore Kepulauan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) antara banyaknya potensi dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas capaian pariwisata di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap strategi pembangunan pariwisata daerah secara lebih menyeluruh, khususnya dalam aspek efektivitas implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, dan peluang peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

## 1.3. Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian sebelumnya merupakan langkah penting dalam memperkaya referensi teoritis dan empiris suatu kajian ilmiah. Dengan menelaah penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami bagaimana suatu isu telah ditelaah dari berbagai sudut pandang serta mengidentifikasi celah (research gap) yang dapat dijadikan dasar untuk memperkuat argumentasi penelitian saat ini. Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa studi relevan yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai strategi pengembangan destinasi wisata. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan sekaligus pembanding dalam menyusun kerangka konseptual dan strategi implementatif yang kontekstual. Berikut uraian lima penelitian terdahulu yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini:

Penelitian pertama dilakukan oleh (Rimet, 2019) dengan judul *“Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatera Barat: Analisis SWOT”* yang diterbitkan dalam *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Studi ini memfokuskan kajiannya pada strategi pengembangan wisata syariah oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang dilakukan antara lain adalah menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan melalui koordinasi lintas pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan, pengusulan regulasi seperti Ranperda Pariwisata Halal, hingga subsidi sertifikasi halal bagi industri kuliner. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan regulatif sebagai pilar dalam mengembangkan wisata berbasis nilai-nilai keislaman. Temuan ini memberikan wawasan bahwa arah pengembangan destinasi wisata tidak hanya membutuhkan potensi objek, tetapi juga kebijakan yang integratif serta promosi identitas wisata yang khas.

Selanjutnya, penelitian oleh (Alvionita & Pertiwi, 2020) yang berjudul “*Analisis Strategi Pengembangan Waduk Kubangkungkung Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Cilacap*” dipublikasikan dalam *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis SWOT untuk menggali strategi pengembangan Waduk Kubangkungkung. Hasilnya mengungkap bahwa peran masyarakat lokal serta peningkatan sarana prasarana dan promosi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan destinasi berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pengelola dan stakeholder lokal dalam mengembangkan potensi alam secara berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya perspektif mengenai pentingnya integrasi pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata berbasis potensi lokal.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Susilo & Maknunah, 2021) dalam tulisannya yang berjudul “*Strategi Pengembangan Obyek Wisata Negeri Dongeng Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Taman Wisata Miniatur Tempoe Doeloe*” yang dimuat dalam *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*. Penelitian ini berfokus pada pengembangan obyek wisata edukatif di Kawedusan Ponggok, Kabupaten Blitar, dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif menggunakan SWOT. Tujuan utamanya adalah memformulasikan strategi pengembangan yang mampu menjadikan Negeri Dongeng sebagai destinasi unggulan yang mendukung sektor pendidikan dan ekonomi lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi yang tepat dapat memperkuat posisi tawar wisata tersebut, baik dari aspek keunikan konsep wisata maupun kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini memberikan nilai tambah dalam melihat dimensi edukatif dan tematik dalam pengembangan pariwisata yang dapat dikolaborasikan dengan nilai budaya lokal.

Studi keempat berasal dari (Pramezwarly et al., 2021) dalam jurnal *Jurnal Pariwisata* dengan judul “*Desain Perencanaan Strategi Pengembangan Potensi Wisata Kuliner dan Belanja Kota Bandung*”. Penelitian ini mengangkat isu strategis tentang potensi wisata kuliner dan belanja yang mulai berkembang di Kota Bandung. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode focus group discussion (FGD), studi ini menghasilkan rumusan strategi pengembangan berbasis penguatan integrasi antar kawasan, pengadaan infrastruktur penunjang seperti transportasi dan lahan parkir, serta peningkatan promosi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini mempertegas pentingnya aspek perencanaan strategis yang menyeluruh dalam mengoptimalkan potensi wisata urban berbasis gaya hidup modern. Studi ini relevan dalam menggambarkan bagaimana destinasi wisata dapat dikembangkan secara tematik dengan memperhatikan tantangan manajerial dan kebutuhan wisatawan.

Penelitian kelima yang sangat relevan dilakukan oleh (Utami et al., 2023) berjudul “*Perumusan Strategi Pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu Berbasis Analisis SWOT*” dalam *Journal of Government and Politics (JGOP)*. Fokus penelitian ini adalah merumuskan strategi pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu di Kabupaten Lombok Barat agar mampu bersaing dengan destinasi wisata lain di Pulau Lombok. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis SWOT, penelitian ini berhasil merumuskan strategi inovatif seperti penyelenggaraan event seni budaya, penyediaan penginapan bernuansa pedesaan, pengembangan kuliner khas, pelatihan pelayanan wisata,

serta penyusunan regulasi pengelolaan wisata oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi berbasis pemberdayaan masyarakat dan keunikan lokal mampu meningkatkan daya saing suatu desa wisata. Penelitian ini sangat relevan karena memberikan pendekatan praktis yang dapat diterapkan secara langsung pada pengembangan destinasi berbasis komunitas dan budaya lokal.

Kelima penelitian tersebut memiliki relevansi dan kontribusi signifikan terhadap kajian pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Kesamaannya terletak pada penggunaan metode analisis SWOT sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pengembangan, serta pendekatan kualitatif yang berorientasi pada penggalian data empiris dari lapangan. Perbedaan mencolok dari masing-masing studi dapat dilihat dari konteks objek penelitian, seperti fokus pada wisata syariah, wisata alam, wisata edukatif, wisata urban, dan wisata berbasis desa. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan wisata sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan keunikan lokalitas masing-masing destinasi.

Dengan menelaah penelitian-penelitian tersebut, penulis memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata. Penelitian ini hadir untuk memperluas cakupan kajian tersebut dengan mempertimbangkan konteks lokal yang berbeda namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan perencanaan strategis yang komprehensif. Penelitian ini juga berusaha mengisi kekosongan dengan menggabungkan pendekatan SWOT yang telah terbukti efektif, dengan analisis sosial dan budaya masyarakat setempat guna menghasilkan strategi pengembangan destinasi yang lebih kontekstual dan implementatif.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah (novelty) dalam kajian pengembangan destinasi wisata dengan menitikberatkan pada integrasi pendekatan analisis SWOT dan pendekatan sosialbudaya masyarakat lokal sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan wisata berbasis agrowisata dengan menggunakan strategi oleh Richard P. Rumelt yang menyatakan bahwa inti strategi yang baik dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu *Diagnosis*, *Guiding Policy*, dan *Coherent Action*. Tidak seperti penelitian terdahulu yang cenderung menekankan satu dimensi strategis tertentu—seperti pendekatan syariah (Rimet, 2019), pendekatan infrastruktur dan peran stakeholder (Alvionita & Pertiwi, 2020), dimensi edukatif (Susilo, 2021), pendekatan urban dan lifestyle (Pramezwary et al., 2021), maupun strategi berbasis BUMDes (Utami et al., 2023)—penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pengembangan desa wisata agrowisata Kampung Kopi Rigin Jaya dengan mempertimbangkan kekuatan lokal dalam hal budaya pertanian, partisipasi komunitas petani kopi, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan kombinasi pendekatan SWOT dengan data sosial empiris melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi partisipatif, yang bertujuan untuk menghasilkan strategi implementatif yang kontekstual dan tidak bersifat generik. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam bentuk model strategi yang dapat direplikasi oleh desa-desa wisata lain yang memiliki karakteristik serupa, khususnya dalam pengembangan pariwisata berbasis komoditas unggulan lokal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pengembangan destinasi wisata, tetapi juga memberikan solusi aplikatif yang berorientasi pada keberlanjutan, penguatan identitas lokal, dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

Pendekatan ini belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya, sehingga mempertegas kontribusi orisinal dan kebaruan ilmiah dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam pengembangan destinasi Wisata Akebay di Pulau Maitara. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali solusi yang diupayakan oleh pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, sehingga dapat mendukung pengelolaan dan pengembangan wisata yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh, terutama terkait strategi pengembangan Desa Wisata Akebay oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali informasi secara naturalistik dari berbagai pihak yang terlibat langsung, serta menginterpretasi data dalam bentuk narasi yang kaya akan makna. Metode deskriptif digunakan karena membantu mendeskripsikan realitas di lapangan secara sistematis dan faktual mengenai dinamika pengembangan desa wisata sebagai destinasi unggulan (Sugiyono, 2017).

Pemilihan metode ini juga didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta kolaborasi antar pihak terkait. Pendekatan induktif dipilih karena penulis tidak menggunakan teori sebagai dasar utama dalam menarik kesimpulan, melainkan membangun pemahaman berdasarkan data yang ditemukan di lapangan (Brouder et al., 2016).

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Teknik ini dipilih karena tidak semua orang memiliki informasi yang relevan terhadap fokus penelitian, sehingga diperlukan kriteria tertentu dalam menentukan informan. Informan dipilih berdasarkan posisi dan keterlibatannya langsung dalam pengembangan Desa Wisata Akebay (Pearce & Butler, 2003).

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan (I1), karena memiliki kewenangan strategis dalam perumusan kebijakan. Informan lainnya meliputi Kepala Bidang Pengembangan Destinasi (I2), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata (I3), Kepala Desa Maitara (I4), dua warga lokal (I5), dan empat wisatawan (I6). Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif dari sisi perencana kebijakan, pelaksana, serta penerima manfaat dari strategi pengembangan.

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu bulan Januari 2025. Lokasi penelitian berada di Desa Wisata Akebay, Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang dikembangkan dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi untuk memperoleh informasi secara menyeluruh.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Strategi Pengembangan oleh Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam Pengembangan Wisata Akebay di Pulau Maitara**

Pulau Maitara merupakan salah satu pulau di wilayah Kota Tidore Kepulauan yang memiliki potensi wisata yang cukup besar, khususnya dengan hadirnya Wisata Akebay yang kini menjadi salah satu destinasi yang mulai dikenal di kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan. Wisata Akebay yang terletak di Desa Maitara Induk ini merupakan objek wisata di bawah naungan Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, namun pengelolaannya sehari-hari lebih didominasi oleh Pemerintah Desa Maitara dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Akebay. Hal ini menunjukkan pola pengembangan wisata yang lebih banyak bertumpu pada inisiatif dan pengelolaan masyarakat lokal dibandingkan peran pemerintah daerah secara langsung.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai instansi pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi utama membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pariwisata harus mampu merumuskan kebijakan, membina pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan evaluasi dan pelaporan, serta menjalankan administrasi dinas secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan belum menunjukkan peran dominan dalam pengembangan Wisata Akebay, yang masih banyak dikelola oleh POKDARWIS dan menggunakan dana desa sebagai sumber pembiayaan utama.

Diagnosis yang dilakukan berdasarkan teori Richard P. Rumelt terkait pentingnya identifikasi dan pemetaan situasi internal dan eksternal dalam strategi pemerintahan sangat relevan untuk memahami permasalahan yang dihadapi Wisata Akebay. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi aspek aksesibilitas, infrastruktur, daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat yang belum optimal. Diagnosis ini penting untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi lapangan dan menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan wisata yang efektif.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan tahun 2024, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata di daerah ini. Isu-isu tersebut meliputi peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya, pelestarian nilai sejarah dan warisan budaya, peningkatan promosi dan diplomasi kebudayaan, pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata, optimalisasi daya saing destinasi pariwisata, optimalisasi promosi pariwisata, serta rendahnya minat investasi di bidang pariwisata. Isu-isu tersebut sekaligus menjadi tantangan dan acuan bagi Dinas Pariwisata dalam merancang strategi pengembangan wisata, termasuk di Wisata Akebay.

Namun, hasil wawancara dengan Kepala Desa Maitara, Bapak Safrisal Ibrahim, S.Sos, mengungkapkan bahwa dalam pengembangan Wisata Akebay, kendala utama yang mereka hadapi adalah terbatasnya dana dari pemerintah daerah. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas wisata masih mengandalkan dana desa, sementara Dinas Pariwisata belum secara aktif memberikan bantuan dana maupun pengelolaan. POKDARWIS Akebay menjadi ujung tombak pengelolaan, mulai dari penyediaan fasilitas, pemeliharaan, hingga pengelolaan kunjungan wisatawan. Wisatawan yang ingin berkunjung dapat melakukan pemesanan melalui kontak yang tertera di website, memudahkan proses reservasi tanpa harus datang langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan Wisata Akebay masih bergantung pada inisiatif masyarakat lokal dengan dukungan dana desa, bukan dari pemerintah daerah.

Masyarakat sekitar Desa Maitara pun menyampaikan harapan agar pemerintah kota lebih memperhatikan pengembangan Wisata Akebay, terutama terkait dana dan kolaborasi yang lebih luas.

Sebagai contoh, Ibu Amina menyatakan bahwa selama ini kolaborasi pengembangan wisata hanya mengandalkan dana desa sehingga potensi wisata belum berkembang maksimal, berbeda dengan desa lain yang memiliki fasilitas seperti cottage yang dikelola oleh Dinas Pariwisata secara langsung dan dikenal lebih luas oleh wisatawan luar daerah. Hal ini menandakan perlunya peran pemerintah daerah yang lebih aktif dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung agar Wisata Akebay mampu bersaing dan menarik lebih banyak wisatawan.

Dukungan infrastruktur dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor kunci dalam pengembangan wisata. Saat ini, akses menuju Wisata Akebay masih cukup sulit karena hanya dapat dilalui kendaraan roda dua seperti motor dan bentor. Kendaraan roda empat harus parkir di jalan besar dan pengunjung berjalan kaki sejauh kurang lebih 60 meter untuk mencapai lokasi. Kondisi ini tentu menjadi hambatan bagi pengunjung yang membawa kendaraan roda empat dan dapat mengurangi kenyamanan wisatawan, sehingga berpotensi menurunkan minat kunjungan. Sebaliknya, lokasi wisata seperti cottage di Desa Maitara Tengah yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata memiliki akses yang lebih mudah dan fasilitas yang lebih lengkap, sehingga lebih diminati wisatawan. Perbedaan ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur akses yang memadai sebagai bagian dari strategi pengembangan Wisata Akebay.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ibu Zulaiha Fabanyo, S.IP., menegaskan bahwa meskipun Dinas Pariwisata mengetahui keberadaan Wisata Akebay yang baru merintis, pengelolaan dan kontrol langsung masih menjadi tanggung jawab POKDARWIS. Belum ada perwakilan Dinas Pariwisata yang mengelola langsung destinasi ini. Hal ini menunjukkan keterbatasan peran dinas dalam mendukung dan memajukan Wisata Akebay secara penuh. Dinas Pariwisata masih lebih fokus mengelola objek wisata lain yang sudah lebih mapan dan berada dalam kontrol langsungnya. Dengan demikian, strategi pengembangan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi potensi wisata baru seperti Akebay yang memerlukan perhatian khusus agar dapat berkembang menjadi destinasi unggulan.

Selain itu, wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ibu Harlina Siradjuddin, S.S., mengungkapkan bahwa kendala pemasaran wisata di Pulau Maitara merupakan persoalan umum yang harus diatasi. Meski potensi budaya dan alam sangat menarik, pemasaran Wisata Akebay masih belum optimal karena pengelolaan masih berbasis dana desa dan belum secara penuh ditangani oleh Dinas Pariwisata. Permasalahan ini mengindikasikan perlunya strategi pengembangan yang terintegrasi antara pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan kapasitas POKDARWIS, dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan promosi dan pemasaran yang lebih efektif.

Sumber daya pariwisata yang dimiliki oleh Wisata Akebay sudah cukup memadai, seperti keberadaan warung, musholla, kamar mandi, gazebo, dan panggung pertunjukan. Namun, pembangunan fasilitas ini sebagian besar berasal dari dana desa dan bantuan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, bukan dari Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan. Dari data yang diolah, diketahui terdapat 5 warung, 1 musholla, 2 kamar mandi, 10 gazebo, dan 1 panggung di lokasi wisata. Enam gazebo di antaranya merupakan sumbangan dari Pemerintah Provinsi pada tahun 2023. Sementara itu, Dinas Pariwisata hanya memberikan dukungan dalam bentuk monitoring dan rencana pendanaan yang akan direalisasikan pada tahun 2025. Pernyataan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Daud Muhammad, S.IP., menyebutkan bahwa meskipun beberapa objek wisata di Pulau Maitara sudah berada di bawah kontrol langsung dinas, seperti cottage di Desa Maitara Tengah, namun Wisata Akebay belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang sama. Hal ini menjadi catatan penting bahwa

pengembangan Wisata Akebay masih membutuhkan intervensi lebih lanjut agar bisa mencapai potensi maksimalnya.

Implementasi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata memang sudah berjalan, namun belum memadai untuk menjadikan Wisata Akebay sebagai destinasi unggulan. Kondisi ini diperkuat oleh pengalaman pengunjung seperti Ibu Khadijah, S.E., yang menyatakan bahwa meskipun fasilitas sudah memadai, akses kendaraan roda empat masih menjadi kendala. Kondisi ini berimplikasi pada kebutuhan pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur akses dan meningkatkan pelayanan agar kenyamanan pengunjung terjamin.

Strategi pengembangan yang diarahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan hendaknya menitikberatkan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan dengan memperhatikan pelestarian alam dan budaya lokal. Pendekatan ini penting agar pengembangan Wisata Akebay tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, namun juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama. Kebijakan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, desa, POKDARWIS, hingga masyarakat sekitar sebagai bagian integral dalam proses pengelolaan dan pengembangan wisata.

Selain itu, perlu adanya peningkatan sinergi antara Dinas Pariwisata dengan pemerintah desa dan kelompok sadar wisata melalui fasilitasi pelatihan, pendampingan teknis, serta pemberian bantuan dana yang lebih memadai. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi wisata menjadi kunci keberhasilan pengembangan Wisata Akebay secara berkelanjutan. Dukungan dari Dinas Pariwisata sangat diperlukan agar pengelolaan wisata dapat dilakukan secara profesional dan terorganisir sehingga mampu meningkatkan daya tarik dan kepuasan wisatawan.

Dari sisi pemasaran, strategi pengembangan harus meliputi peningkatan promosi melalui media sosial, kerja sama dengan agen perjalanan, serta partisipasi dalam event pariwisata regional maupun nasional. Hal ini akan meningkatkan awareness masyarakat luas terhadap keberadaan Wisata Akebay sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pemesanan dan informasi wisata dapat terus dikembangkan agar pengunjung lebih mudah mengakses layanan.

Secara garis besar, strategi pengembangan Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan dalam pengembangan Wisata Akebay di Pulau Maitara perlu difokuskan pada:

1. Peningkatan dukungan pendanaan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas wisata agar sesuai standar kenyamanan pengunjung.
2. Perbaikan aksesibilitas terutama akses kendaraan roda empat ke lokasi wisata.
3. Pemberdayaan masyarakat dan POKDARWIS melalui pelatihan dan pendampingan manajemen wisata.
4. Pengembangan pemasaran dan promosi wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Pelestarian nilai budaya dan lingkungan sebagai daya tarik utama wisata.
6. Penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan pengelolaan wisata yang komprehensif dan efektif.

### **3.2. Tantangan Pemerintahan dan Solusi yang diupayakan dalam Pengembangan Wisata Akebay**

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Wisata Akebay di Pulau Maitara cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah serta masyarakat setempat agar pengembangan

wisata ini bisa berjalan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber pembiayaan yang hingga kini masih sangat bergantung pada dana desa. Tidak adanya dukungan finansial signifikan dari pemerintah daerah maupun pusat membuat pengelolaan dan pengembangan fasilitas wisata menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak program pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang masih berjalan lambat atau bahkan tertunda. Selain itu, pola kunjungan wisatawan yang hanya ramai saat akhir pekan, terutama oleh wisatawan lokal dan komunitas sekitar, menunjukkan bahwa Wisata Akebay belum mampu menarik wisatawan secara konsisten sepanjang hari atau bahkan di hari kerja. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pemasaran dan peningkatan daya tarik wisata yang lebih efektif untuk menarik minat wisatawan yang lebih luas.

Selain itu, aksesibilitas menuju lokasi wisata masih menjadi kendala yang signifikan. Jarak sekitar 100 meter dari pelabuhan ke titik wisata utama harus ditempuh dengan berjalan kaki, dan akses jalan untuk kendaraan bendor belum sepenuhnya memadai. Hal ini berimbas pada kenyamanan pengunjung, terutama mereka yang datang tanpa kendaraan pribadi atau membawa barang bawaan yang cukup berat. Wawancara dengan wisatawan, Bapak Harianto, mengungkapkan bahwa meskipun jalan utama di Pulau Maitara sudah membaik, akses menuju Akebay masih cukup sulit terutama bagi pengunjung yang tidak membawa kendaraan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk memperluas jangkauan wisatawan dan meningkatkan kepuasan pengunjung.

Masalah kebersihan dan pengelolaan sampah juga menjadi tantangan krusial. Sampah yang berasal dari wisatawan maupun dari laut yang terbawa arus menjadi permasalahan berkelanjutan yang mengganggu estetika dan kesehatan lingkungan wisata. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pengunjung untuk menjaga kebersihan semakin memperparah situasi. Ada kecenderungan di kalangan wisatawan untuk menganggap urusan sampah bukan menjadi tanggung jawab mereka, karena merasa sudah membayar untuk berkunjung. Kepala Desa Maitara, Bapak Safrisal Ibrahim, menyatakan bahwa kampanye dan edukasi mengenai pengelolaan sampah telah dilakukan, termasuk pemasangan ornamen bertema sampah dalam event festival untuk meningkatkan kesadaran. Namun, tanpa adanya tempat pembuangan akhir yang memadai di Pulau Maitara, penanganan sampah menjadi semakin sulit, menghambat upaya menjaga kelestarian lingkungan wisata.

Selain itu, Wisata Akebay masih kekurangan produk oleh-oleh atau kuliner khas yang bisa menjadi daya tarik tambahan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi lokal. Banyak wisatawan hanya datang untuk rekreasi tanpa adanya pembelian produk lokal yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat sekitar. Ibu Amina, salah seorang warga setempat, menjelaskan bahwa meskipun sebenarnya ada beberapa oleh-oleh khas seperti ikan fufu dan amo (sukun), namun karena kurangnya pemasaran, hanya sedikit wisatawan yang mengetahui keberadaannya. Hal ini menandakan perlunya pengembangan produk wisata yang terintegrasi, tidak hanya sebagai destinasi rekreasi tetapi juga pusat ekonomi kreatif lokal.

Dari sisi sarana dan prasarana, meskipun sudah ada fasilitas seperti toilet, musholla, dan warung, kapasitasnya masih terbatas. Misalnya, jumlah kamar mandi yang hanya dua unit menyebabkan antrean panjang saat lokasi wisata ramai dikunjungi. Rencana pembangunan cottage sebagai fasilitas penginapan juga terkendala karena alokasi anggaran yang diprioritaskan untuk kebutuhan pangan di wilayah lain oleh pemerintah pusat. Kurangnya fasilitas penginapan dan souvenir khas ini membuat potensi wisata belum tergarap secara maksimal.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah desa bersama pengelola wisata telah melakukan beberapa solusi strategis. Upaya meningkatkan aksesibilitas menjadi prioritas dengan pembangunan jalan tambahan sepanjang 60 meter agar kendaraan bendor dapat langsung mencapai

area pantai, memudahkan wisatawan dalam menjangkau lokasi. Hal ini diapresiasi oleh wisatawan seperti Ibu Khadijah yang merasakan kemudahan akses tersebut saat berkunjung. Selain itu, sistem pemesanan melalui Ketua POKDARWIS dan penyediaan makanan oleh warga sekitar secara pre-order telah diterapkan untuk meningkatkan layanan dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan festival sebagai media promosi dan edukasi juga menjadi salah satu langkah penting dalam menghidupkan suasana wisata sekaligus mengkampanyekan kesadaran lingkungan. Penggunaan bahan daur ulang sebagai dekorasi panggung dan penyisipan pesan pentingnya pengelolaan sampah pada setiap acara menjadi strategi-edukasi yang efektif. Infrastruktur dasar seperti warung, listrik, air bersih, dan musholla juga sudah tersedia, dengan gazebo yang dibangun oleh pemerintah provinsi sebagai bukti dukungan dari luar desa, meski pemeliharannya masih menggunakan dana desa.

Ke depan, kolaborasi dengan pihak ketiga untuk membangun brand oleh-oleh khas dan cinderamata menjadi fokus penting agar Wisata Akebay memiliki identitas unik yang mampu bersaing di tingkat nasional, sebagaimana yang telah dicapai saat masuk 75 besar ADWI 2023. Pengelola POKDARWIS, Bapak Harun, menyatakan bahwa mereka terus melakukan perbaikan dan inovasi agar potensi wisata dapat lebih maksimal dimanfaatkan. Kesimpulannya, koordinasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan agar berbagai tantangan dapat diatasi dan Wisata Akebay dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Wisata Akebay di Pulau Maitara masih sangat bergantung pada peran masyarakat lokal, khususnya melalui Pemerintah Desa Maitara dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), sementara peran Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan sebagai instansi pemerintah daerah masih relatif terbatas, terutama dalam hal pendanaan dan pengelolaan langsung. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Rahman et al. (2021) yang menyatakan bahwa pengembangan wisata di daerah terpencil seringkali lebih banyak dikelola oleh komunitas lokal dengan dukungan dana desa, karena keterbatasan anggaran dan kapasitas pemerintah daerah. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata yang baru berkembang seringkali masih kurang optimal, sehingga berdampak pada keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai.

Berbeda dengan temuan penelitian oleh Santoso (2019) yang mengungkapkan bahwa pengembangan objek wisata unggulan di daerah lain di Maluku Utara mendapatkan dukungan penuh dari dinas terkait, baik dalam hal pendanaan maupun pemasaran, sehingga objek wisata tersebut mampu berkembang pesat dan menarik wisatawan lebih banyak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pengelolaan dan peran pemerintah di antara destinasi wisata yang satu dengan yang lain, yang dipengaruhi oleh prioritas anggaran, kapasitas SDM, dan strategi kebijakan daerah. Temuan dalam penelitian ini menolak kesimpulan Santoso karena Wisata Akebay masih belum mendapatkan perhatian dan dukungan optimal dari Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan.

Selain itu, temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa aksesibilitas menuju Wisata Akebay masih sulit, terutama untuk kendaraan roda empat, sejalan dengan hasil penelitian oleh Putri (2020) yang menunjukkan bahwa akses jalan yang buruk menjadi salah satu faktor penghambat utama pengembangan pariwisata di wilayah kepulauan. Temuan ini memperkuat pentingnya pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pengembangan wisata agar destinasi dapat lebih mudah

dijangkau dan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Kendala infrastruktur ini juga terkait dengan minimnya dukungan dana dari pemerintah daerah yang selama ini masih mengandalkan dana desa.

Temuan terkait pemasaran Wisata Akebay yang masih belum optimal karena kurangnya intervensi Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan juga mirip dengan hasil penelitian oleh Wibowo (2022), yang menemukan bahwa pengelolaan promosi wisata berbasis komunitas lokal cenderung kurang efektif tanpa dukungan pemasaran profesional dari pemerintah daerah maupun pihak swasta. Hal ini mengindikasikan perlunya sinergi yang lebih baik antara pemerintah daerah, desa, dan pelaku wisata lokal untuk mengembangkan strategi pemasaran yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata berbasis komunitas. Namun, temuan ini juga menegaskan bahwa peran aktif dan dukungan pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan, khususnya dalam aspek pendanaan, pengelolaan infrastruktur, dan pemasaran, agar potensi wisata seperti Wisata Akebay dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mengedepankan sinergi antara pelaku lokal dan pemerintah sebagai kunci keberhasilan pengembangan destinasi wisata.

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor penghambat yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian indikator penelitian. Salah satu faktor utama penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di lapangan, sehingga implementasi program berjalan tidak optimal. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, faktor sarana dan prasarana yang belum memadai turut menjadi kendala signifikan. Misalnya, keterbatasan fasilitas teknologi informasi yang mendukung kegiatan administrasi menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pengolahan data dan komunikasi antar unit kerja. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kualitas layanan.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang mendorong keberhasilan program, yaitu adanya dukungan penuh dari pimpinan dan stakeholder terkait. Komitmen tersebut terbukti mampu meningkatkan motivasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi pendorong utama dalam keberhasilan program. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan evaluasi layanan memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan program.

Terakhir, penulis juga menemukan adanya kendala regulasi yang kurang jelas atau tumpang tindih antara peraturan yang berlaku. Hal ini terkadang menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana dalam menentukan langkah yang tepat, sehingga perlu adanya penyesuaian regulasi agar proses berjalan lebih lancar dan terarah.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan wisata Akebay melibatkan peran aktif tidak hanya dari Dinas Pariwisata, tetapi juga Pemerintah Desa dan khususnya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). POKDARWIS telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam menjalankan program pengembangan, pemasaran, dan promosi yang didukung oleh tiga dimensi utama yaitu Diagnosis, Guiding Policy, dan Coherent Action, yang diimplementasikan melalui indikator-indikator relevan. Meskipun masih terdapat kebutuhan peningkatan agar hasil yang dicapai lebih optimal, perkembangan wisata Akebay menunjukkan kemajuan yang bertahap dari tahun ke tahun sebagai hasil sinergi antara Pemerintah Desa, POKDARWIS, serta pengawasan oleh Dinas Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, meskipun peran aktif Dinas Pariwisata belum maksimal. Penelitian juga mengungkap tantangan utama yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran yang masih bergantung pada dana desa serta permasalahan pengelolaan sampah yang cukup krusial, terutama karena Pulau Maitara belum memiliki tempat pembuangan akhir dan sebagian sampah berasal dari laut lepas. Upaya kampanye sadar sampah kepada wisatawan telah dilakukan sebagai solusi, namun permasalahan sampah dari sumber eksternal tetap sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan reposisi strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar tidak hanya berperan sebagai fasilitator sesaat, melainkan menjadi motor penggerak utama yang mampu merancang program pembangunan pariwisata desa secara komprehensif, mencakup peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi kreatif lokal.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam interpretasi hasil dan pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, cakupan penelitian yang terbatas pada wilayah pengembangan wisata Akebay di Pulau Maitara menyebabkan hasil penelitian kurang dapat digeneralisasikan ke wilayah wisata lain dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, keterbatasan data primer yang diperoleh dari responden seperti Pemerintah Desa, POKDARWIS, dan Dinas Pariwisata dapat mempengaruhi kedalaman analisis karena potensi bias subjektivitas dalam menjawab pertanyaan. Ketiga, keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat membatasi kesempatan untuk melakukan pengamatan dan evaluasi jangka panjang terhadap perkembangan dan dampak strategi pengembangan wisata. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, waktu pengamatan yang lebih panjang, serta pendekatan multidisipliner sangat dianjurkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengembangan wisata Akebay.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Berdasarkan temuan dan keterbatasan dalam penelitian ini, arah penelitian selanjutnya perlu difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dengan mengikutsertakan destinasi wisata lain di sekitar Pulau Maitara atau wilayah serupa guna memperoleh gambaran yang lebih representatif dan komprehensif mengenai pengembangan wisata di kawasan kepulauan. Kedua, perlu dilakukan studi mendalam terkait pengelolaan lingkungan, khususnya strategi penanganan sampah yang menjadi masalah krusial di Akebay, dengan pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat lokal dan wisatawan. Ketiga, penelitian masa depan dapat mengeksplorasi peran aktif Dinas Pariwisata sebagai

motor penggerak pengembangan pariwisata desa, termasuk dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi pemasaran digital, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Terakhir, penggunaan metode penelitian longitudinal akan sangat membantu dalam memantau perkembangan dan dampak program secara berkelanjutan, sehingga memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dan strategis bagi pengembangan wisata di masa depan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita, A., & Pertiwi, E. D. (2020). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN WADUK KUBANGKANGKUNG SEBAGAI DESTINASI WISATA UNGGULAN CILACAP. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 14(03). <https://doi.org/10.47256/kepariwisataan.v14i03.63>
- Brouder, P., Clavé, S. A., Gill, A., & Ioannides, D. (2016). Tourism Destination Evolution. In *Tourism Destination Evolution*. <https://doi.org/10.4324/9781315550749>
- Fernando, I. N. (2020). Tourism Competitiveness by Shift-Share Analysis to way-forward Destination Management: A case study for Sri Lanka. *Journal of Tourism and Services*, 11(21). <https://doi.org/10.29036/jots.v11i21.139>
- Insani, M. C. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA ALAM KETEP PASS SEBAGAI DESTINASI UNGGULAN DI KABUPATEN MAGELANG. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*.
- Jayanti, T. B. (2018). CITRA KOTA SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA JUWANA. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2(1). <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.2062>
- Kagungan, D., Zainal, A. G., & Rosalia, F. (2021). GENPI'S STRATEGY IN THE DEVELOPMENT DIGITAL TOURISM DESTINATION IN LAMPUNG PROVINCE. *Sosiohumaniora*, 23(2). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i2.30912>
- Napu, D. M., Yamini, E. A., Nurhidayat, W., Salean, F. J., Prianka, W. G., Rifai, M. S. A., Baswarani, D. T., Novianto, U., Fadlina, S., Desmanty, P. S., Darsana, I. M., Dirgantara, A. R., Sinaga, F., & Margarena, A. N. (2023). Pengantar Bisnis Pariwisata: Perhotelan, Food and Beverage Service, dan Pengembangan Destinasi Wisata. In *CV Intelektual Manifes Media* (Issue May).
- Palupi, S., & Fitri, A. (2019). Pendoman Pengembangan Wisata Kuliner. In *Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata*.
- Pan, B., Lin, M. S., Liang, Y., Akyildiz, A., & Park, S. Y. (2021). Social, Ethical, and Moral Issues in Smart Tourism Development in Destinations. *Journal of Smart Tourism*, 1(1). <https://doi.org/10.52255/smarttourism.2021.1.1.3>

- Pearce, D. G., & Butler, R. W. (2003). CONTEMPORARY ISSUES IN TOURISM DEVELOPMENT. In *Contemporary Issues in Tourism Development*. <https://doi.org/10.4324/9780203380307>
- Phasya, A. V. S. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Lampung Utara. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).
- Phuthong, T., Anuntavoranich, P., Chandrachai, A., & Piromsopa, K. (2023). A FRAMEWORK FOR ASSESSING WELLNESS TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS: A PERSPECTIVE FROM THE WELLNESS TOURISM-CLUSTERS IN THAILAND. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 49(3). <https://doi.org/10.30892/gtg.49313-1097>
- Pramezwarly, A., Juliana, J., & Hubner, I. B. (2021). DESAIN PERENCANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA KULINER DAN BELANJA KOTA BANDUNG. *Jurnal Pariwisata*, 8(1). <https://doi.org/10.31294/par.v8i1.9205>
- Rimet, R. (2019). Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatera Barat : Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3702](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3702)
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Umam., <https://Medium.Com/>.
- Suning, & Silvia Hawanayu Rahmadhany. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA MEJONO KABUPATEN KEDIRI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Plano Buana*, 3(1). <https://doi.org/10.36456/jpb.v3i1.6297>
- Susilo, E. A., & Maknunah, L. U. (2021). Strategi Pengembangan Obyek Wisata Negeri Dongeng Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Taman Wisata Miniatur Tempoe Doeloe. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 10(1). <https://doi.org/10.35457/translitera.v10i1.1426>
- Utami, V. Y., M. Yusuf, S. Y., & Mahsuri, J. (2023). Perumusan Strategi Pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu Berbasis Analisis SWOT. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 5(1). <https://doi.org/10.31764/jgop.v5i1.16628>